

Ilmu Perpustakaan Dan Informasi: sebuah tinjauan ringkas tentang aspek ontologi dan epistemologi dalam konteks Indonesia.¹

Putu Laxman Pendit²

Abstrak: Dengan mengakui pentingnya keberadaan dimensi sosial dalam perkembangan ilmu pengetahuan, makalah ini mencoba memperjelas aspek ontologis dan epistemologis Ilmu Perpustakaan & Informasi di Indonesia, dengan pertama-tama dan terutama meninjau aspek historis-kontekstual dari pustaka dan informasi sebagai objek kajian. Diusulkan agar pustaka dan informasi dilihat sebagai bagian dari epistemologi sosial yang semula ditawarkan Egan dan Shera sebagai pondasi ilmu ini. Diusulkan pula agar pembahasan tentang hal ini sebaiknya tidak dilepaskan dari potensi kebergunaan (aksiologi) Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi negara dan bangsa yang bercirikan kemajemukan budaya seperti Indonesia.

Pengantar

Di satu dekade terakhir ini tampaknya kepustakawanan dan ilmu perpustakaan di Indonesia berada dalam posisi terdesak sewaktu berhadapan dengan persoalan mendasar yang mempertanyakan eksistensinya. Di dunia akademik melalui birokrasi pendidikan tinggi telah berlangsung upaya menerus dan sistematis untuk mempersoalkan status keilmuan, khususnya di bidang perpustakaan. Di tataran praktis, di kalangan pustakawan dan masyarakat sendiri telah berlangsung pula pengabaian profesionalisme berlandaskan ilmu perpustakaan khususnya di jajaran pegawai negeri sipil dengan berbagai alasan.

Keadaan ini berlangsung di suatu masa ketika teknologi informasi sedang mendapat tempat di segala aspek kehidupan dan didukung oleh bisnis berkapital besar untuk menjadi penggerak utama dalam perekonomian. Selain itu, bersamaan dengan melonggarnya kebebasan berekspresi dan berpolitik, teknologi informasi seolah-olah menjadi satu-satunya sarana yang dianggap tepat dan memadai untuk mencari, bertukar, beradu pendapat, dan berdagang informasi. Bentuk-bentuk teknologi, media, dan instrumen lainnya, termasuk perpustakaan, jelas sekali terpinggirkan dalam hal ini.

Pada saat yang sama pula kita melihat situasi paradoksal: selagi masih berkuat dengan kurang tersebar nya kebiasaan membaca buku dan rendahnya peringkat keberaksaraan di masyarakat, kita malah mengonsumsi perangkat digital dalam jumlah eksponensial. Kita semua tentu tahu bahwa saat ini ada dua gejala fenomenal – keleluasaan berekspresi dan meluasnya penggunaan perangkat digital – yang menimbulkan kekhawatiran mendasar bukan saja karena kebiasaan sehari-hari atau sopan-santun kita berubah, namun sendi-sendi kehidupan dan norma kebangsaan pun terasa ikut goyah.

Semua itu terjadi ketika perpustakaan dan pustakawan justru nampak semakin surut ke belakang meja, dan peran mereka semakin menjadi subordinat dari berbagai upaya lain. Misalnya, lihatlah betapa istilah “literasi” yang sebenarnya amat lekat dengan kepustakawanan kini menjadi “mainan” berbagai pihak yang aktif bergerak (dan mendapatkan dukungan dana). Alih-alih mendanai dan

¹ Makalah untuk Diskusi *Memetakan Perkembangan Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Indonesia*, di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 15 Maret 2018.

² Peneliti Ilmu Perpustakaan & Informasi, pembina Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia.

memberdayakan perpustakaan di segala lini (dan khususnya di lini-lini dasar), banyak energi dan sumberdaya yang dikerahkan ke institusi atau komponen masyarakat lain.

Lalu, seolah menambahkan cuka ke luka, berkumandang pula akhir-akhir ini sebuah wacana tentang “tidak perlu ilmu untuk menjadi pustakawan” dan kajian-kajian tentang perpustakaan bukanlah bagian dari ilmu. Makalah ini mencoba merespon gejala-gejala di atas dengan melakukan tinjauan ringkas secara ontologis dan epistemologis untuk meyakinkan diri sendiri maupun pihak lain bahwa Ilmu Perpustakaan dan Informasi masih (dan perlu) ada di Indonesia.

Dimensi Sosial dari Ilmu Pengetahuan

Dalam filsafat ilmu selalu dikatakan bahwa ilmu memiliki dimensi sosial, selain dimensi formal-akademiknya. Namun pembicaraan di kalangan kita yang peduli atau prihatin tentang Ilmu Perpustakaan dan Informasi biasanya lebih berkisar pada aspek-aspek formal sebuah ilmu. Maksud saya, kita lebih sering asyik dan sibuk menetapkan definisi dan mengulik persyaratan-persyaratan formal untuk menjadikan sebuah kajian atau kegiatan akademik memenuhi persyaratan “ilmiah”. Terakhir kita bahkan sibuk menerjemahkan frasa Inggris *Library & Information Science* dengan menggunakan argumen-argumen gramatika bahasa.

Padahal sebuah ilmu tak mungkin berkembang dalam kevakuman sosial. Aspek aksiologi dalam filsafat ilmu jelas-jelas mengaitkan ilmu dengan masyarakatnya, khususnya sebagai pihak yang mendapatkan manfaat. Selain itu, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan terstruktur yang disebut ilmu pengetahuan, nota bene adalah produksi sebuah masyarakat. Hal ini sudah merupakan kajian dari apa yang disebut “sosiologi pengetahuan” (*sociology of knowledge*). Pondasi-pondasi pemikiran tentang sosiologi pengetahuan ini sudah diletakkan misalnya oleh Karl Marx yang antara lain menegaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan pada akhirnya dipengaruhi oleh realitas sosio-ekonomik dalam kondisi sejarah yang menentukan pula ideologi sebagai sebuah *superstructure*. Pikiran Marx ini kemudian dilanjutkan oleh György Lukács yang melihat pengetahuan dan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari proses produksi budaya sebuah masyarakat.

Emile Durkheim juga adalah salah satu peletak pondasi sosiologi pengetahuan ketika menyatakan bahwa cara manusia menata dan mengklasifikasi pandangan serta pengalaman mereka ditentukan oleh struktur sosial masyarakat tersebut. Kita tahu bahwa penggunaan klasifikasi dan logika adalah unsur terpenting dalam pengembangan pengetahuan yang terstruktur dan sistematis sebagai cikal-bakal ilmu pengetahuan. Perkembangan kajian sosiologi pengetahuan ini menjadi semakin kentara oleh Max Scheler dan Karl Mannheim di tahun 1920-an, khususnya di Jerman ketika ilmu-ilmu sejarah dan sosial sedang gencar-gencarnya digunakan untuk menggali pondasi-pondasi ilmu pengetahuan.

Secara lebih spesifik para filsuf dan pemikir kemudian juga mempelajari dimensi sosial ilmu pengetahuan (*scientific knowledge*) yang bisa dilacak ke belakang sampai ke filsuf Inggris John Stuart Mill³. Bertiga bersama Charles Sanders Peirce dan Karl Popper, merekalah yang memulai pengamatan terhadap terbentuknya pengetahuan yang dapat dibuktikan kebenarannya sebagai bagian dari interaksi antar individu:

- Mill sejak awal menegaskan bahwa pencapaian ilmu pengetahuan merupakan pencapaian kolektif, bukan individual.

³ Penjelasan ringkas dan padat tentang dimensi sosial ilmu pengetahuan ini dapat dibaca di situs Universitas Stanford - <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-knowledge-social>

- Peirce memberikan sumbangan pandangan yang fundamental bagi epistemologi sosial untuk ilmu pengetahuan (*social epistemology of science*) ketika menyatakan bahwa pendapat yang akhirnya disetujui oleh semua pihak yang meneliti hal yang sama lah yang diterima sebagai kebenaran (*truth*) dan objeknya dianggap sebagai realita.
- Popper memperjelas batas kajian epistemologi sosial ketika ia mengembangkan metode kritis dalam ilmu pengetahuan dalam bentuk falsifikasi logis dan praktis (*logical and practical senses of falsification*). Kita tahu bahwa hipotesis adalah konsep Popper untuk falsifikasi logis, namun jangan lupa bahwa hipotesis ini juga harus dikomunikasikan dan diperdebatkan di dalam komunitas ilmuwan, sehingga akan juga berada di dalam konteks sosial di mana sebuah ilmu pengetahuan dikembangkan.

Sejak dicanangkan oleh ketiga filsuf di atas, epistemologi sosial ilmu pengetahuan sekarang berkembang sebagai cabang filsafat yang sangat populer, khususnya untuk menjawab masalah-masalah masa kini ketika ilmu pengetahuan dan teknologi berperan amat penting bagi kemajuan maupun kemunduran kehidupan manusia.

Sementara itu ada pula jalur lain yang mempelajari dimensi sosial ilmu pengetahuan, yaitu sosiologi ilmu pengetahuan (*sociology of science*) yang berurusan dengan kondisi sosial dan dampak sosial dari ilmu pengetahuan. Dengan teori-teori sosial, cabang sosiologi ini menyelidiki struktur dan proses sosial di masyarakat di mana ilmu pengetahuan berkembang atau tidak berkembang. Dari kajian-kajian sosiologis lah muncul temuan-temuan tentang bagaimana tradisi ilmu berkembang dan terinstitusionalisasi di masyarakatnya, bagaimana perkembangan itu kemudian dikelola, dan bagaimana riset dibiayai atau ditolak.

Kajian dan pemikiran Max Weber tentang modernisasi di masyarakat merupakan salah satu pendorong sosiologi ilmu pengetahuan, khususnya ketika penelitian tentang alam dan masyarakat menjadi kegiatan mandiri yang sebelumnya selalu dipengaruhi oleh agama dan gereja (lihat Ben-David dan Sullivan, 1975). Formalisasi sosiologi ilmu pengetahuan ini kemudian juga semakin menguat melalui kajian-kajian Robert Merton tentang kaitan antara perekonomian moderen ("kapitalis"), elemen-elemen religi, dan ilmu pengetahuan di masa Abad 17 di Inggris. Merton kemudian dianggap sebagai salah satu tokoh sosiologi moderen, dan teori-teorinya tentang tentang konsekuensi yang tak direncanakan (*unintended consequences*), kelompok rujukan (*reference group*), dan *role model* bisa dipakai juga untuk memahami dimensi sosial ilmu pengetahuan. Bukunya, *The Sociology of Science* (Merton, 1973) adalah karya klasik yang tetap relevan sampai sekarang.

Baik sosiologi, epistemologi, maupun filsafat ilmu pengetahuan akhirnya merupakan upaya menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan sebagai bagian dari masyarakat yang memproduksinya. Ada dua cara menjelaskannya, yaitu:

1. Secara non-deskriptif : ketika kita menjelaskan etika atau norma-norma yang mengarahkan pengembangan dan pelaksanaan penelitian ilmiah di suatu masyarakat, selain juga menjelaskan asal-muasal dan dinamika ilmu sebagai kajian epistemologis.
2. Secara deskriptif : ketika kita menjelaskan sejarah perkembangan suatu ilmu di masyarakat, interaksi ilmuwan dengan masyarakatnya, tokoh-tokoh penemu dan pengembang teori suatu ilmu, dan politik serta kebijakan pemerintah suatu negara dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks inilah saya menganjurkan kita juga membicarakan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (selanjutnya IP&I) dalam dimensi sosial, khususnya ketika ilmu ini hendak dikembangkan atau hendak dihentikan perkembangannya di Indonesia. Walaupun belum pernah ada penelitian yang mendalam

tentang epistemologi IP&I di Indonesia, kita dapat melihat bahwa apa yang disinyalir nyaris dua dekade yang lalu oleh Dick (1999) masih berlaku saat ini. Ia mengatakan bahwa kita sering secara tidak sadar memisahkan antara apa yang dilakukan pustakawan (*what librarians do*) dengan apa itu (makna) dari perpustakaan (*what libraries mean*). Akibatnya, kita seringkali lebih tertarik kepada yang pertama – apa yang dikerjakan pustakawan – karena berimplikasi praktis sehingga dianggap lebih ada gunanya bagi profesi pustakawan. Pendidikan kepustakawanan pada umumnya berorientasi ke sini, demikian pula penelitiannya⁴.

Pada hal yang sama "perpustakaan" pada dirinya sendiri juga punya makna penting. *What libraries mean* sebenarnya amatlah perlu dipahami dan dikaji secara ilmiah karena kita juga ingin membuktikan bahwa perpustakaan dan semua turunannya itu memiliki makna dalam kehadirannya sebagai institusi. Namun kajian tentang perpustakaan seperti ini tidak langsung berimplikasi praktis; tidak dapat langsung menjadi terapan atau teknik penyelenggaraan perpustakaan. Saya akan kembali ke soal ini di bagian lain makalah ini.

Apa yang diuraikan Dick di atas sedikit banyaknya dapat pula dipakai untuk melihat perkembangan penelitian IP&I di Indonesia. Walaupun dengan latar belakang berbeda, namun jelaslah bahwa IP&I di Indonesia lebih mengutamakan sisi praktis katimbang sisi maknawi dari perpustakaan. Pada berbagai kesempatan yang silam, penulis telah mengentrai betapa latar belakang pendirian perpustakaan di Indonesia lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan praktis dan instrumental (Pendit, 1992a; Pendit, 1992b).

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian kita adalah universitas di Indonesia yang menjadi pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk IP&I. Kita tahu bahwa universitas merupakan sebuah *epistemic culture* (Knorr-Cetina, 1999) yang mengandung aspek-aspek penting seperti sistem kepakaran (*expert systems*), budaya organisasi, struktur, dan prosedur kerja⁵. Orientasi teknis-praktis IP&I di Indonesia tidak saja ditentukan oleh perkembangan perpustakaan sebagai instrumen yang ditentukan oleh keaktifan negara/pemerintah dalam mendanai pengembangannya, tetapi juga oleh "layanan" universitas penyelenggara pendidikan IP&I terhadap orientasi tersebut. Ini berbeda dibandingkan, misalnya, perkembangan di Eropa. Sebagaimana diteliti oleh Åström (2008) kondisi perkembangan IP&I di negara-negara Nordic mencerminkan gejala yang disebut sebagai "Mode 2" dalam ilmu pengetahuan, khususnya karena memperlihatkan kaitan amat erat dengan penerapan di wilayah praktik dan pengaruh amat kuat dari disiplin ilmu di mana sekolah IP&I tersebut berada, khususnya dari segi alokasi dana penelitian dan kredibilitas keilmuan. Dengan kata lain, telah terjadi semacam "negosiasi" antara perkembangan praktik di luar universitas (yang menyebabkan para peneliti IP&I "melayani" kepentingan industri atau profesi) dan aspirasi keilmuan yang diwakili oleh disiplin ilmu di mana jurusan IP&I itu berada.

Di Indonesia, tradisi IP&I sulit dikatakan berkait dengan disiplin ilmu di mana sebuah jurusan atau departemen berada. Disiplin ilmu kepada siapa sebuah departemen IP&I "menginduk" hanyalah kuat berpengaruh pada kurikulum pengajaran sarjana. Penelitian-penelitian IP&I di Indonesia seringkali lebih mengakar pada praktik dan teknis penyelenggaraan perpustakaan, katimbang pada tradisi keilmuan tertentu. Kecenderungannya memberikan kesan bahwa IP&I di Indonesia memiliki karakter penelitian evaluasi (*evaluation research*) yang mementingkan tujuan menghasilkan masukan bagi

⁴ Secara lebih rinci hal ini sudah saya bahas sebelumnya, lihat Pendit (2011a).

⁵ *Epistemic cultures* atau budaya epistemik dibentuk oleh kedekatan (*affinity*), kebutuhan-kepentingan (*necessity*), dan latarbelakang sejarah, ikut menentukan apa yang kita ketahui dan bagaimana kita mengetahuinya. Karin Knorr-Cetina menjelaskan bagaimana keragaman dalam budaya di pusat-pusat penelitian dan universitas telah mempengaruhi upaya membentuk apa yang disebut *unified science*.

pengambilan keputusan administratif dalam penyelenggaraan perpustakaan. Memang, penelitian evaluasi juga adalah salah satu jenis yang amat populer di IP&I di berbagai negara khususnya sebagai sebuah penelitian ilmu sosial yang berorientasi praktis maupun akademik dan menggunakan survei sebagai metode utamanya (Powell, 2006). Di Indonesia, penggunaan metode evaluasi ini nampaknya lebih untuk keperluan praktis daripada akademik.

Akibat orientasi ke aspek praktis/teknis dan ketiadaan ikatan dengan disiplin “induk”-nya, maka IP&I di Indonesia juga memperlihatkan kesan mengabaikan perkembangan teori. Padahal akademisi IP&I di Indonesia sebenarnya berada di berbagai fakultas yang memiliki disiplin dan tradisi keilmuan tersendiri, misalnya di fakultas ilmu budaya (di Universitas Indonesia dan sebagian besar universitas lainnya), di fakultas ilmu sosial (di Universitas Airlangga dan Universitas Padjadjaran), atau di fakultas teknik (di Institut Pertanian Bogor). Keberadaan para akademisi IP&I di berbagai fakultas tersebut tak serta merta menyebabkan mereka menggunakan teori-teori dari ilmu “tuan rumah” mereka. Sedangkan ketika mereka mengadakan penelitian, pada umumnya mereka tak pula bisa mengklaim telah menggunakan teori yang spesifik atau yang berbeda dari teori “tuan rumah” mereka.

Maka muncul keadaan yang sebenarnya amat merugikan perkembangan IP&I di Indonesia, yaitu dalam bentuk keraguan masyarakat akademik tentang keilmiahannya (misalnya dalam bentuk pertanyaan “Benarkah IP&I sebuah ilmu jika yang dikajinya hanya praktik atau prosedur teknis?”) atau dalam bentuk keraguan landasan ilmiahnya (misalnya dalam bentuk pertanyaan, “Apakah IP&I memiliki teori sendiri?”). Di lain pihak, para akademisi IP&I sendiri tak dapat secara tuntas menjelaskan klaim mereka tentang keilmuan, sebab – sebagaimana telah diuraikan di atas – mereka pada umumnya mengandalkan penelitian evaluasi terhadap praktik dan prosedur kerja di perpustakaan. Kalau pun mereka berupaya mengklaim keilmiahannya kegiatan mereka, maka yang kemudian nampak adalah IP&I sebagai metode penelitian yang positivistik, mengandalkan survei serta statistik, tetapi tak dapat menggunakan alasan-alasan teoritik untuk menjelaskan kekhasannya (dus, tidak terlihat sebagai ilmu yang spesifik). Dengan kata lain pula, penggunaan metode atau teknik penelitian tertentu secara sering di IP&I di Indonesia sebenarnya tak dapat menyentuh persoalan yang lebih mendasar tentang epistemologi.

Ketiadaan kepastian epistemologi ini, sebagaimana saya nyatakan sebelumnya, ikut ditentukan oleh orientasi kita kepada masalah-masalah teknis, khususnya masalah yang dihadapi profesi ketika bekerja (*what librarians do*), sehingga akhirnya juga muncul ketidakpastian ontologis tentang apa yang sebenarnya menjadi objek perhatian IP&I. Diskursus tentang upaya menghilangkan kata “ilmu” dalam “ilmu perpustakaan”, misalnya, memperlihatkan ketidakpastian ontologis. Sebagian pihak menganggap bahwa “perpustakaan” sama halnya dengan “kedokteran” bukanlah sebuah ilmu pengetahuan, melainkan sebangunan praktik profesional berbasis pelatihan-pelatihan dan aplikasi berbagai ilmu. Padahal ada perbedaan amat penting dari kedua istilah tersebut, di mana yang satu memang merujuk ke sebuah profesi (dokter), sementara yang lain merujuk ke sebuah budaya dan institusi sosial (pustaka) yang jauh lebih luas dari sekadar profesi (pustakawan).

Saya akan menggunakan kesempatan berikut ini untuk menjelaskan pustaka secara ontologis.

Apa yang Dimaksud Pustaka?

Poepowardojo dan Seran (2016) menyatakan bahwa persoalan ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah persoalan ontologi, yakni:

... bagaimana menjelaskan hakikat kenyataan dalam konteks empiris-positivistik, historis-kontekstual, dan perpaduan (integrasi) di antara keduanya. ... Pendekatan historis-

kontekstual menekankan pengetahuan sebagai sebuah penemuan yang tersituasi oleh sebuah konteks historis (hal. 341).

Kata “perpustakaan” dalam IP&I mengandung di dalamnya kata “pustaka” dan sesungguhnya inilah objek kajiannya, bukan perpustakaan. Sebagai kata bentukan, “perpustakaan” adalah segala sesuatu urusan tentang pustaka, sama halnya dengan “perdagangan” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang. Tetapi apa itu “pustaka”, jarang sekali kita kaji secara lebih mendalam, termasuk oleh universitas yang selama ini lebih berorientasi kepada penyelenggaraan perpustakaan. Ada aspek historis-kontekstual yang selama ini kita abaikan, dan di makalah ini saya ingin memulai pengkajiannya.

Sebagaimana banyak kata lainnya, kata “pustaka” bukanlah kata orisinal bangsa Indonesia. Dari penelusuran tentang asal-muasal kata ini, ditemukan fakta bahwa “pustaka” sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke jazirah India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar tentang sistem tulisan dari bangsa Iran. Kata aslinya adalah *post* atau *posta* yang berarti “kulit binatang” dan merujuk ke material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menerakan tulisan⁶. Ini menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya di wilayah itu dari segi media dan “teknologi tulisan”.

Patut juga kita pahami bahwa sejak pertama digunakan, bahasa tulisan dan teknik menerakan huruf pada medium ini merupakan sarana yang dianggap vital dan bahkan sakral. Kulit binatang sebagai medium ini kemudian dikenal sebagai perkamen (*parchment*). Sebagaimana diuraikan oleh Laufer (1919, hal. 563), sebelum kertas kasar sederhana (papyrus) digunakan di Timur Tengah, orang-orang Persia sudah menggunakan perkamen sebagai bahan untuk menerakan tulisan terutama untuk arsip kerajaan⁷. Kelak kebiasaan menggunakan perkamen sebagai medium tulisan ini diadopsi oleh orang-orang Romawi. Mereka segera menggunakan perkamen (yang kemudian disebut juga *membrana*) untuk mengganti tablet dari kayu atau tanah liat yang populer pada Abad 1 SM.

Tulisan dan perkamen dari kulit binatang ini juga kemudian berperan penting dalam penyebaran agama-agama sebelum datangnya agama-agama pewayhuan. Penelitian arkeologi menemukan bahwa kitab Avesta⁸ dan Zend ditulis di atas perkamen dari kulit lembu. Begitulah kemudian kebiasaan tulis-menulis menggunakan medium yang mudah dibawa-bawa (*portable*) sekaligus tahan lama

⁶ Kata *post* inilah yang dalam bahasa Sansekerta menjadi *pusta* atau *pustaka* (himpunan, buku), dari mana kemudian orang Tibet mengenal *po-ti*. Dalam bahasa-bahasa Indo-Aryan kata ini muncul dalam berbagai bentuk, misalnya di bahasa Assam menjadi *puthi*, di Bengali menjadi *pustôk*, di Bhojpuri ada kata *pôthi*, di Gujarat dikenal *pustak*, di Kashmiri menjadi *pūthi*, di Nepal menjadi *pothi*, di Punjab dikenal sebagai *pustak*, dan dalam bahasa Urdu menjadi *pustak*. Dari persentuhan antara peradaban India dan Asia Tenggara lah maka kemudian di bahasa Melayu muncul kata *pustaka*.

⁷ Sejarah tentang arsip kerajaan Persia sering diperdebatkan. Beberapa peneliti meragukan keberadaan arsip ini namun peneliti lain bisa membuktikan bahwa beberapa pernyataan di kitab-kitab Yahudi menyebutkan keberadaan arsip tersebut. Sedikit banyaknya ini dapat dijadikan acuan tentang kebiasaan pengarsipan yang sama tuanya dengan peradaban tulisan.

⁸ **Avesta** /ə'vestə/ merupakan koleksi karya tulis yang dianggap suci bagi sebuah agama di wilayah Aryan yang dikenal dengan nama Zoroastrianisme, merupakan agama utama di kekaisaran Persia (559 SM sampai to 651 M). Ajarannya dianggap ikut memengaruhi agama-agama besar lainnya. Sampai sekarang agama ini masih diraktikkan, terutama di Iran dan India. **Zend** atau **Zand** adalah istilah Zoroaster untuk ringkasan, parafrasa, komentar, dan terjemahan teks Avesta. Istilah *zand* sendiri adalah bentuk pendek dari bahasa Avesta, *zainti*, yang berarti interpretasi. Kelak hampir semua agama memakai sistem yang serupa, yaitu sebuah kitab suci didampingi beberapa kitab yang berisi interpretasinya.

(*durable*) ini menyebar dan menjadi bagian dari setiap peradaban, termasuk peradaban berbasis Hindu di India. Walaupun orang-orang di India kemudian menggunakan berbagai bahan selain kulit binatang, namun kata pusta dan pustaka akhirnya dimaknai sebagai karya tulis yang diterakan di atas medium, khususnya dalam bentuk himpunan atau kumpulan. Lebih jauh lagi, sebagaimana diuraikan Taher (1994, hal. 26) istilah pustaka populer di abad 10 India ketika muncul penulis-penulis kawakan bangsa itu menghasilkan ke karya-karya yang dianggap bernilai tinggi.

Makna yang memuliakan pustaka lebih dari sekadar medium tulisan semakin jelas terlihat dalam mitologi Hindu, khususnya yang berhubungan dengan dewi Saraswati, yang dipercaya sebagai perwujudan kuasa Tuhan dalam hal pengetahuan, seni, dan pendidikan. Dalam mitos dikatakan bahwa Dewi Saraswati memiliki empat tangan dan tangan pertama menggenggam pustaka – simbol dari dari Weda (kitab suci Hindu) sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Ketiga tangan lainnya masing-masing memegang *mala* (tasbih) sebagai simbol spiritualitas, pot air sebagai simbol penyucian pikiran, dan *vina* (alat musik menyerupai gitar). Simbolisasi seperti ini menandai makna pustaka yang sentral dalam perkembangan pengetahuan dan ilmu dalam mitologi Hindu.

Kita di Indonesia menggunakan kata pustaka karena pengaruh kebudayaan India/Hindu di kerajaan-kerajaan Nusantara, sementara suku bangsa Melayu juga sudah menyerap kata dan makna pustaka ke dalam khasanah bahasa mereka. Patut dicatat, bahwa kata pustaka dipertahankan dan dimaknai secara spesial walaupun bahasa Melayu (dan lalu juga bahasa kita) mengenal kata lain yang bermakna serupa, yaitu “buku”. Fakta ini menegaskan bahwa di dalam Bahasa Indonesia, arti kata pustaka sebenarnya *bukan* lah buku. Di Indonesia, jelaslah bahwa kata “buku” diserap dari bahasa Belanda, *boek*, dan bahasa Inggris, *book*⁹. Kita tentu dapat menyimpulkan bahwa kata “buku” yang kita gunakan sekarang merujuk ke sebuah teknologi baru yang berbeda dari ketika kata “pustaka” digunakan di masa sebelum kolonialisme melanda Asia. Sejak awal jelas lah pula bahwa buku berhubungan dengan teknologi cetak. Dalam hal ini patut kita catat bahwa mesin cetak mekanis pertama yang menggunakan huruf Latin masuk ke Indonesia pada 14 Maret 1688 dari negeri Belanda (Taufik, 1977, hal. 19). Mesin ini khususnya digunakan untuk penerbitan surat kabar¹⁰.

Dualisme istilah yang merujuk ke satu medium dengan latar-teknologi berbeda ini nanti dapat membantu kita memeriksa perbedaan makna yang sekarang kita gunakan antara “*per-pustaka-an*” dan “*per-buku-an*”. Patut kita garisbawahi, bahwa sebelum kolonialisme Belanda tiba di Indonesia, suku-suku bangsa di Nusantara sudah punya tradisi tulisan dan tradisi menyimpan media untuk keperluan-keperluan sosial-budaya. Dua di antaranya patut kita perhatikan:

1. Di Batak, ada kata “*pustaha*” yang sangat mirip dengan kata pustaka. Kata ini merujuk tak saja ke benda berbentuk buku, tetapi juga ke sebuah institusi budaya yang berkaitan dengan kepercayaan setempat, khususnya menyangkut hal yang keramat dan pernujuman. *Pustaha* bukan sembarang buku, sebab mengandung penghormatan etnik terhadap kebajikan (*wisdom*) masa lampau (lihat Wilken, 1887; Teygeler, 1993; dan Kozok, 2000).

⁹ Di kedua negara asalnya sendiri, digunakan kata yang berbeda antara *boek* atau *book* dengan *bibliotheek* dan *library*. Dengan kata lain – sama halnya dengan Indonesia dan Melayu – pustaka dan buku dimaknai secara terpisah, seperti orang Inggris membedakan antara *libry* dan *book*, atau orang Belanda membedakan antara *biblio* dan *boek*.

¹⁰ Menarik untuk dicermati bahwa diperlukan hampir 200 tahun setelah mengimpor mesin cetak bagi Pemeintah Kolonial untuk mendirikan Percetakan Negara (berdiri pada tahun 1809 dengan nama “*Lands Drukkerij*”). Setelah ada percetakan dokumen-dokumen negara, muncul pula teknologi pengarsipan yang lebih moderen, sekaligus menegaskan peran arsip dalam pemerintahan kolonial -- sebuah peran yang tidak sepenuhnya kita warisi setelah kemerdekaan.

2. Di Jawa, para Raja, khususnya Raja di Solo dan di Yogyakarta, menggunakan kata pustaka misalnya dalam Rekso Pustoko dan Radya Pustaka untuk merujuk ke himpunan naskah penting yang amat berkaitan dengan falsafah hidup orang Jawa (Lihat Wyatt, 1982). Baik Rekso Pustoko maupun Radya Pustaka didirikan, dirawat, dan dikembangkan oleh Kerajaan; dan sampai masa tertentu hanya boleh digunakan oleh masyarakat terbatas.

Baik Pustaha maupun Pustaka, dengan kata lain, adalah "lebih dari sekadar media berbentuk buku" (*beyond book*) dan bukan pula "kitab", yang kemudian juga dipakai dalam kata Alkitab. Kata pustaha maupun pustaka bukan merujuk ke bentuk (format) atau medium, melainkan ke fungsinya, dan lebih tepatnya: ke fungsi yang mulia, terhormat, berharga untuk mempertahankan suatu nilai lokal-tradisional tertentu. Kita dapat melihat sepintas bahwa pustaka amat berkaitan pula dengan pengetahuan dalam arti luas, sehingga dapat kita kaitkan dengan epistemologi sosial dan budaya epistemik dengan konteks lokal.

Pemerintah Kolonial Belanda menggunakan kata "pustaka" untuk sebuah institusi buatan mereka, yaitu Balai Pustaka. Dalam bahasa aslinya, institusi ini sebenarnya bernama *Kantoor voor de Volkslectuur*, alias "kantor yang mengurus bacaan rakyat". Dengan latarbelakang sejarah pemaknaan pustaka sebagaimana diuraikan di atas, tentu amat menarik bagi kita, mengapa Pemerintah Kolonial Belanda menggunakan kata pustaka yang sampai sekarang melekat dalam kata perpustakaan. Salah satu cara untuk mengetahui pemaknaan kata ini adalah dengan memeriksa apa sesungguhnya tujuan pendirian kantor tersebut.

Balai Pustaka

Belanda memakai kata "pustaka" pastilah karena kata ini sudah sarat makna sewaktu mereka mendirikan sebuah institusi untuk kepentingan pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan maksud-maksud kolonial mereka (Setiadi, 1992; Farid, 2016). Dalam sebuah ulasan yang amat kritis, Jedamski (1992) juga mengatakan Balai Pustaka sebagai "serigala kolonial berbulu domba" untuk menegaskan bahwa institusi ini memiliki tujuan-tujuan yang hanya mengedepankan kepentingan pihak penjajah. Sementara Fitzpatrick (2008) lebih spesifik mengatakan bahwa Balai Pustaka adalah instrumen kolonialisme dan simbol bagi 'pembinaan' rakyat jajahan melalui bacaan dan keberaksaraan (*literacy*).

Bermula dari upaya "kecil-kecilan" pada tahun 1905 untuk mengkoordinasikan pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan buku-buku pelajaran sekolah-sekolah di Jawa dan Madura, khususnya di pedesaan, institusi ini pada tahun 1908 bernama *Commissie voor de Inlandsche School- en Volkslectuur* (Komisi Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat). Kerjanya seperti gabungan antara badan sensor dan kantor penerjemah. Komisi inilah yang menerjemahkan dan mengubah atau bahkan mengubah sama-sekali cerita-cerita rakyat dalam bahasa Jawa ke bahasa Belanda atau Melayu dengan huruf Latin.

Pada tahun 1910 muncul D.A. Rinkes yang kemudian mengambil alih kepemimpinan Komisi dan berhasil meningkatkan status lembaga ini dari sekadar unit di Departemen Urusan Pribumi menjadi sebuah badan otonom pada tahun 1917 dengan nama *Bureau voor de Volkslectuur* yang akhirnya resmi sebagai sebuah "kantor", yakni *Kantoor voor de Volkslectuur* dengan nama Melayu, Balai Pustaka. Rinkes adalah seorang politikus dan intelektual yang menjadi inisiator kebijakan kolonial melalui pendidikan dan bacaan. Ia mengubah kegiatan yang semula hanya menerjemahkan buku, menjadi sebuah upaya serius untuk membentuk kebudayaan berbasis buku di tanah jajahan.

Kita sekarang boleh saja berdebat tentang “maksud baik” Rinkes, namun yang jelas Balai Pustaka di tangannya menjadi sebuah instrumen ampuh dalam memengaruhi perkembangan literasi dan kemudian juga sastra Indonesia dan budaya berbasis tulisan Latin pada umumnya. Strategi awalnya adalah mengajak sekelompok kecil elit Indonesia yang berpendidikan “barat” untuk ikut mengurus Balai Pustaka. Lewat kelompok kecil inilah Rinkes kemudian berhasil merasuk ke semua lapisan masyarakat Indonesia. Dalam strategi selanjutnya, sebagaimana dikatakan Mahayana (1994, hal. 16), Rinkes menerapkan sepenuhnya teknik asimilasi dan adaptasi untuk memasukkan unsur propaganda “keunggulan Barat” melalui buku-buku pelajaran maupun buku bacaan umum.

Rinkes dan Balai Pustaka juga adalah pionir pendirian sistem untuk umum yang meluas dan ekstensif yang diberi nama “Taman Poestaka”. Konsep dan implementasi sistem ini merupakan hal baru yang revolusioner di zaman itu. Buku-buku bacaan terpilih tersedia di ratusan desa dan sekolah, dipasok oleh Balai Pustaka dan dikelola oleh pengajar atau pengurus desa. Sudah sejak 1916 pula koleksi buku ini ditambah dengan koleksi berbahasa Belanda, selain bahasa Melayu dan Sunda. Walaupun sebagian besar “taman” ini tak lebih dari sebuah rak buku 3 x 3 meter yang diletakkan di dalam kelas, namun jelaslah bahwa Balai Pustaka berhasil memperluas jangkauan kebijakan literasi kolonial Belanda lewat sistem yang “menumpang” di jaringan pendidikan untuk pribumi yang sudah lebih dulu ada.

Balai Pustaka juga berperan amat besar dalam mengembangkan aktivitas membaca sebagai bagian dari peningkatan pengetahuan mandiri. Melalui tulisan-tulisan di jurnal mereka, *Pandji Poestaka*, para pengelola melakukan promosi literasi kepada para pegawai perkebunan atau kantor-kantor kolonial yang mempekerjakan penduduk pribumi, agar mereka mau membaca untuk meningkatkan pengetahuan dan menghindari “aktivitas di luar perusahaan yang tidak bermanfaat”. Upaya seperti ini dikenali Jedamski (1992, hal. 27) sebagai upaya menangkal radikalisme para pegawai pribumi yang sering terbujuk ikut gerakan “ekstrimis” menentang kolonialisme.

Fungsi lain dari Balai Pustaka yang juga tumbuh pesat di tangan Rinkes adalah penerbitan yang memanfaatkan jalur monopoli dalam distribusi buku. Bahkan, pada 1925 Rinkes merangsek lebih jauh ke pelosok Indonesia dengan perpustakaan keliling (*mobile libraries*) dan agen promosi literasi yang berfungsi ganda sebagai vendor buku. Sinergi fungsional dalam peran-peran penerbit, Taman Poestaka, perpustakaan keliling, dan agen penjualan buku ini, menjadikan Balai Pustaka sebuah institusi dengan jaringan amat efisien serta efektif dalam menerapkan politik kolonial di bidang bacaan dan pendidikan. Ketika Rinkes pensiun di tahun 1927, penerus-penerusnya tinggal melanjutkan kerja sistemik yang sudah ia bangun dengan baik itu. Balai Pustaka bertahan melalui masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan sampai sekarang dalam bentuk perusahaan milik pemerintah.

Sepak terjang Balai Pustaka meninggalkan bekas yang amat mendasar dalam kebudayaan dan peradaban berbasis tulisan di Indonesia. Jelaslah bahwa keberadaan instrumen kolonialisme dalam keberaksaraan ini sangat memengaruhi perkembangan sastra Indonesia pada khususnya, dan literasi pada umumnya (Teeuw, 1972). Program-program literasi kolonial juga amat jelas meninggalkan pondasi yang lumayan kokoh bagi sistem perpustakaan yang sekarang kita miliki. Melalui literasi pula Pemerintah Kolonial Belanda sebenarnya ikut membentuk arah perkembangan masyarakat jajahan mereka, khususnya dalam pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

Setelah Indonesia merdeka, Balai Pustaka tidak dibubarkan dan tetap berdiri sampai sekarang. Selain mempertahankan kantor peninggalan kolonial ini, Pemerintahan di masa-masa awal kemerdekaan juga mendirikan lembaga lain untuk melanjutkan kerja Balai Pustaka, khususnya peninggalan berupa taman-taman pustaka yang menyebar di seluruh Indonesia. Lembaga lain ini adalah dalam bentuk sebuah biro di dalam kementerian/departemen pendidikan. Kelak biro ini berkembang menjadi

penentu semua kebijakan awal yang khusus melaksanakan “urusan-urusan pustaka”, maka ia dikenal sebagai “biro *per-pustaka-an*”¹¹.

Perpustakaan Sebagai “Urusan”

Kita perlu memeriksa situasi pasca-kolonial, khususnya yang berkaitan dengan pustaka, sebagai konteks sosial dari dipertahankannya Balai Pustaka dan didirikannya biro khusus *per-pustaka-an*. Ada dua hal yang perlu kita pahami:

1. Situasi atau fenomena literatur pasca kolonial. Dalam hal ini, Indonesia punya keunikan. Sebagaimana dikatakan Foulcher (1995), jika pada umumnya negara-negara bekas jajahan melanjutkan peradaban tulis menulis mereka dengan bahasa kolonial, maka – berkat “bantuan” Balai Pustaka – Indonesia nyaris tidak pernah memiliki literatur pribumi dalam bahasa Belanda¹².
2. Di Indonesia juga terjadi fenomena kebangsaan yang umumnya terjadi di negara-negara bekas jajahan yang kemudian dikenal dengan istilah *developmental nationalism* atau “nasionalisme pembangunan”. Sebagaimana dikatakan Desai (2008), nasionalisme pembangunan ini berbeda dibandingkan nasionalisme kolonial, khususnya karena lebih banyak merupakan intervensi negara/pemerintah (yang baru saja merdeka) untuk secepat mungkin membangun sistem politik dan ekonomi yang menyejahterakan rakyat. Mengambil contoh di Korea Selatan yang juga merdeka di tahun 1945, nasionalisme pembangunan ini seringkali menjadi pendorong utama kebangkitan ekonomi sebuah negara. Pemerintah memobilisasi semangat kebangsaan Korea dan menyalurkannya untuk mengembangkan industri yang mandiri (lihat Lee, 2012).

Kedua fenomena pasca-kolonialisme di atas dapat membantu menjelaskan mengapa di Indonesia kita punya sebuah kantor yang mengelola *pustaka*, dan sebuah kantor lain yang menangani *perpustakaan*. Sejak awal kemerdekaan, literatur Indonesia moderen bukan literatur dalam bahasa kolonial melainkan dalam bahasa Melayu moderen yang memang selama ini menjadi alat komunikasi antar-etnik, dan yang lewat Sumpah Pemuda kita nyatakan sebagai bahasa persatuan. Inilah yang diurus oleh Balai *Pustaka*. Sementara di saat sama Pemerintah ingin segera melakukan modernisasi, termasuk modernisasi dalam infrastruktur pendidikan (baik pendidikan formal maupun informal). Inilah yang diurus biro perpustakaan.

Balai Pustaka sampai sekarang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan konsentrasi pada penerbitan karya-karya sastra. Walau sempat akan ditutup pada tahun 2014 yang lalu, namun sampai sekarang lembaga ini berupaya bertahan dan bahkan bangkit kembali melalui inovasi digital. Bekerja sama dengan badan usaha milik negara lainnya, yakni PT Telekomunikasi Indonesia, Balai ini pada tahun 2016 justru menjalin sinergi untuk menghadirkan apa yang mereka sebut Taman Bacaan Digital atau “Telkom e-Book Corner”. Sedangkan urusan yang menyangkut pustaka untuk pendidikan formal dan informal mendapatkan legitimasinya di dalam bentuk perpustakaan-perpustakaan yang sekarang tersebar di sekolah, perguruan tinggi, desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai di institusi

¹¹ Dalam bahasa Indonesia, imbuhan-gabungan “*per- -an*” mengubah kata dasar menjadi “perihal melakukan” atau “tentang masalah”, sehingga kata *per-dagang-an* berarti hal-hal yang berkaitan dengan melakukan dagang atau tentang masalah dagang. Maka *per-pustaka-an* berarti hal-hal yang berkaitan dan tentang masalah yang berkaitan dengan pustaka.

¹² Fenomena pasca-kolonial di bidang pustaka pada umumnya dipahami sebagai fenomena yang digerakkan oleh tulisan (dan kajian tentang tulisan) berbahasa kolonial, misalnya bahasa Inggris dan Perancis di Afrika, dan bahasa Inggris di India dan Karibia.

“puncak” yang diberi nama Perpustakaan Nasional (Kebangsaan). Urusan pustaka ini menjadi urusan pemerintah dan memiliki skala yang amat besar (ada ribuan sekolah dasar, menengah, dan atas, ratusan perpustakaan khusus, dan puluhan perpustakaan umum). Namun walaupun kedua lembaga pemerintah ini menggunakan kata “pustaka” di dalam nama mereka, nyaris tidak ada koordinasi (apalagi kerjasama) antara keduanya.

Balai Pustaka kita pertahankan sebagai penghargaan terhadap bahasa Indonesia yang sejak awal dimanfaatkan untuk membentuk kebangsaan (nasionalisme). Walaupun pada awalnya kebijakan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* ini adalah untuk “memadamkan” semangat kedaerahan, di tangan para budayawan dan pemikir Nusantara justru menjadi sarana untuk membentuk identitas persatuan dan kesatuan melawan Belanda! Bahasa Indonesia menjadi sebuah sarana ampuh untuk membentuk nasionalisme yang menegaskan bahwa kita tidak punya “ikatan historis” dengan Belanda¹³. Sedangkan *per-pustaka-an* lebih merupakan instrumen negara/pemerintah untuk melakukan intervensi-intervensi di bidang pendidikan formal maupun informal, serta kemudian juga ilmu pengetahuan. Jadi, Balai *Pustaka* cenderung menjadi lembaga budaya, sementara *per-pustaka-an* cenderung merupakan birokrasi pemerintah.

Sementara itu patut pula kita garisbawahi, sebelum kemerdekaan Belanda sudah pula mendirikan lembaga-lembaga yang mengurus media tercetak (buku, jurnal, surat kabar) sebagai sebuah himpunan dengan tradisi Eropa Barat dan yang kemudian kita kenal sebagai “perpustakaan”, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga-lembaga ini menggunakan nama *bibliotheek* yang merupakan adaptasi bangsa Belanda terhadap kata Yunani *biblio*. Sementara untuk pendidikan formal yang merupakan pendidikan ala Barat, juga ada *volksbibliotheek* dengan koleksi yang antara lain dipasok oleh Balai Pustaka¹⁴. Pada masa itu sudah nampak kerancuan penggunaan istilah dan konsep, ketika *lectuur* (dalam *Kantoor voor de Volklectuur*) diterjemahkan menjadi “pustaka” sementara *bibliotheek* (dalam *volksbibliotheek*) dibiarkan dalam bahasa Belanda, tetapi kemudian menjadi Taman Pustaka (karena dikendalikan oleh Balai Pustaka).

Kata dan konsep *bibli* sempat dipertahankan di masa awal kemerdekaan ketika Pemerintah melalui kementerian yang mengurus pendidikan membuat sebuah unit khusus yang disebut Kantor Bibliografi Nasional. Jika dilihat dari tugas dan fungsinya, maka unit ini mengemban makna *bibli* sebagai kegiatan teknis mengumpulkan dan mencatat karya-karya yang (waktu itu) adalah terbitan-terbitan tercetak; amat berbeda dari motif penggunaan kata “pustaka” yang dipertahankan dalam Balai Pustaka yang kita gunakan sampai sekarang. Unit bibliografi ini kemudian digabung dengan Biro Perpustakaan dan menjadi Lembaga Perpustakaan. Lebih jauh lagi, lembaga ini kemudian menjadi Pusat Pembinaan Perpustakaan yang berdiri sampai 1990¹⁵. Perkembangan selama 40 tahun ini semakin memperjelas bahwa kata dan konsep “perpustakaan” adalah sebuah urusan atau birokrasi atau kegiatan teknis.

¹³ Dalam uraiannya, Foulcher menggunakan anekdot tentang Soebandrio (bekas Menteri Luar Negeri di zaman Soekarno yang kemudian ditahan seumur hidup sebagai dampak dari penggulingan Orde Lama oleh Soeharto). Sewaktu muda, Soebandrio adalah intelektual yang ikut menggerakkan nasionalisme lewat pemikiran dan tulisan-tulisannya. Ia adalah salah satu dari sedikit intelektual yang menguatirkan kondisi psikologis para intelektual pejuang kemerdekaan di Indonesia. Baginya, banyak intelektual Indonesia sebenarnya memiliki dua kepribadian. Di satu sisi mereka ingin menjadi “Indonesia yang asli (otentik)”, di sisi lain mereka besar dan menjadi intelektual justru karena pendidikan “Barat” (dalam hal ini pendidikan Belanda). Mengutip filsuf moderen India, Homi Bhabha, fenomena seperti ini disebut sebagai *inauthenticity* dan sebenarnya terus ada sampai sekarang. Banyak intelektual dan budayawan kita sebenarnya dididik di luar sehingga menjadi orang Indonesia yang “ke-barat-barat-an” atau “ke-timur-timur-an”.

¹⁴ Untuk sejarah yang lebih lengkap tentang lembaga-lembaga ini, lihat Sulisty-Basuki (1994).

¹⁵ Pembahasan kegiatan unit bibliografi ini sebagai bagian dari perkembangan Perpustakaan Nasional dapat dibaca di Sulisty-Basuki (2008).

Konsep dan makna teknis ini semakin jauh dari kata dan makna pustaka yang sudah hadir sejak zaman pra-kolonial, dan sudah pula diadopsi Belanda untuk mengembangkan konsep kebangsaan yang sesuai dengan kepentingan mereka, dan yang sedikit-banyaknya ikut memengaruhi konsep kebangsaan Indonesia.

Konsep dan makna perpustakaan sebagai urusan teknis dan birokrasi semakin kentara ketika Perpustakaan Nasional Republik Indonesia didirikan pada tanggal 17 Mei 1980 dengan status sebagai salah satu “unit pelaksana teknis” di kementerian yang membawahi pendidikan dan kebudayaan. Unit ini sebenarnya menggabungkan empat unit atau kantor pemerintahan yang telah ada sebelumnya, yaitu Perpustakaan Museum Nasional, Perpustakaan Sejarah Politik dan Sosial, Kantor Bibliografi Nasional, dan Perpustakaan Wilayah (Negara) Jakarta. Sementara itu, kita patut juga mencatat bahwa ada berbagai upaya mengembangkan sebuah lembaga yang mengurus dan mengkoordinasi urusan-urusan teknis di tingkat nasional ini di sepanjang sejarah Indonesia. Banyak pihak yang sudah dilibatkan, tetapi sampai dengan munculnya seseorang yang dekat dengan kekuasaan, upaya tersebut tidak benar-benar terwujud. Perpustakaan Nasional sebagai sebuah lembaga yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden baru berhasil berdiri setelah Mastini Hardjoprakoso ikut memperjuangkannya (Sulistyo-Basuki, 2008).

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perbedaan makna pustaka dan perpustakaan ikut disebabkan oleh perubahan cara kita memaknai fungsi literasi dan budaya berbasis tulisan pada umumnya, dan karya-karya tulis yang dihasilkan sebuah masyarakat pada khususnya. Di masa-masa pra-kolonial dan menjelang kemerdekaan, nampak cukup jelas bahwa pustaka sangat berkaitan dengan perkembangan pemikiran tentang pengetahuan, pendidikan, dan bahkan kebangsaan. Baik di masa keemasan kerajaan-kerajaan Nusantara, maupun di masa kejayaan kolonial Belanda, yang kemudian diikuti dengan keruntuhannya, konsep dan makna pustaka selalu dikaitkan dengan upaya menggalang rasa kebangsaan, baik sebagai bagian dari kedinastian, kekuasaan kolonial, maupun dalam upaya kemerdekaan.

Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya, kata pustaka digunakan secara agak berbeda karena konsentrasi bangsa beralih ke upaya-upaya mendirikan unit dan aparat pemerintahan di segala bidang dalam rangka membangun sebuah negara moderen. Penggunaan kata “perpustakaan” telah menggarisbawahi bahwa pustaka bukan lagi spesifik tentang karya tulis yang berfungsi kebangsaan sebagaimana yang berkembang di masa kolonial, melainkan sebuah urusan teknis dan pengelolaan buku dan berbagai media untuk berbagai keperluan yang diurus oleh pemerintah/negara. Dari sejak itulah maka perpustakaan cenderung identik dengan urusan pemerintahan dan birokrasi (istilah “perpustakaan pelat merah” digunakan dalam Pendit, 2009). Bahkan ketika kata “nasional” atau kebangsaan akhirnya digunakan untuk sebuah lembaga negara, yaitu Perpustakaan Nasional, urusan teknis dan pengelolaan menjadi lebih menonjol katimbang urusan kebangsaan (nasional). Ini dapat dimengerti jika kita juga memahami perubahan makna kebangsaan ketika kita mengadopsi konsep nasionalisme-pembangunan sebagai konsep pasca-kolonialisme sebagaimana diuraikan di atas.

Pustaka dan Epistemologi Sosial

Saya berharap uraian di atas dapat memperlihatkan pustaka sebagai bagian dari epistemologi sosial bangsa Indonesia, dan bukan sekadar merujuk ke medium berbentuk buku, bukan pula ke urusan teknis pengelolaan yang kemudian kita sebut perpustakaan itu. Dalam konteks pembicaraan tentang IP&I kita beruntung mendapatkan warisan kata yang bermakna luas ini, sebab epistemologi sosial memang adalah salah satu pondasi ontologisnya. Pembahasan tentang hal ini telah dimulai oleh Margaret Egan dan Jesse Shera sejak 1952, kira-kira sama dengan pada saat Pemerintah Indonesia

mulai mengembangkan Biro Perpustakaan. Sebagai pustakawan profesional, keduanya berupayamencari penegasan tentang apa yang sesungguhnya melandasi pekerjaan mereka, yang lebih dari sekadar menjalankan pengelolaan perpustakaan berdasarkan aturan dan mekanisme tertentu¹⁶.

Menggunakan analisis struktural-fungsionalis Talcot Parsons, khususnya tentang tiga “*modes of orientation*”, yaitu: kognitif, *goal-directed*, dan afektif. Egan dan Shera menyimpulkan bahwa perlu ada sebuah “disiplin baru” yang mengacu kepada apa yang mereka namakan “*social epistemology*” atau epistemologi sosial. Secara ringkas, epistemologi sosial menurut Egan dan Shera merujuk kepada kenyataan bahwa sebuah masyarakat selalu secara bersama-sama memerlukan pengetahuan tentang diri dan lingkungannya, sehingga masyarakat itu akan senantiasa terlibat dalam pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pengetahuan. Egan dan Shera melihat pengetahuan sebagai persoalan kognitif (perilaku kognitif). Menurut mereka, epistemologi tradisional mengkaji perilaku kognitif di tingkat individual (epistemologi individual), sehingga untuk mengkaji perilaku kognitif di tingkat sosial digunakanlah epistemologi sosial .

Egan dan Shera kemudian mengajukan sebuah kerangka teoritis untuk mempelajari apa yang mereka sebut *intellectual products* (produk pemikiran) yang dalam kehidupan sehari-hari dapat berwujud “*instruments of graphic communication*” (alat/sarana komunikasi grafis). Lalu, untuk membantu sebuah masyarakat menata pembuatan, penyebaran, dan penggunaan produk pemikiran berbentuk alat komunikasi itu, diperlukan apa yang mereka sebut “*instruments of bibliography*” (alat/sarana bibliografi). Secara spesifik, Egan dan Shera melihat “*bibliography*” sebagai sarana dengan mana pengetahuan individual dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan sehingga masyarakat sebagai kesatuan dapat “tahu” dengan cara yang transendental. Sekarang ini kita tahu bahwa “*instruments of graphiccommunication*” itu tentunya adalah dokumen dalam segala bentuknya, sedangkan “*instruments of bibliography*” adalah berbagai sarana seperti indeks dan sistem temu kembali.

Setelah meletakkan dasar pemikiran seperti itu, Egan dan Shera kemudian menegaskan bahwa setiap masyarakat memerlukan sebuah profesi yang dapat membantu masyarakat tersebut melakukan tindakan-tindakan sosial yang cerdas melalui sebuah sistem yang mampu mengelola pengetahuan bersama. Sejak awal rupanya Egan dan Shera telah berkonsentrasi pada penciptaan sebuah sistem terencana di tingkat nasional, di dalam mana komponen-komponen pengetahuan individual dikoordinasikan dan diintegrasikan.

Untuk dapat membuat sistem yang demikian itu, Egan dan Shera mengajukan tiga wilayah analisis, yaitu:

1. Analisis situasi yang kemudian berkembang menjadi “*information needs analysis*,” untuk memahami situasi masyarakat berdasarkan kebutuhan informasi anggota masyarakat atau individu dalam situasi tertentu.
2. Analisis unit informasi yang kemudian menjadi dasar bagi pengorganisasian pengetahuan (*knowledge organization*) di mana metodologi dikembangkan untuk mengklasifikasi dokumen berdasarkan isinya.
3. Analisis statistik produksi, distribusi, dan penggunaan dokumen yang biasa disebut bibliometrika.

Kita segera dapat mengaitkan konsep Egan dan Shera tentang epistemologi sosial dan perangkat-perangkat pendukungnya ini dengan kata dan makna konseptual pustaka yang saya uraikan di atas.

¹⁶ Pembahasan lengkap dan terinci tentang epistemologi sosial ini sudah saya lakukan di tempat lain (lihat Pendit, 2011b).

Secara historis-kontekstual kata pustaka berkembang maknanya, dari semula hanya merujuk ke benda atau medium untuk menerakan tulisan, lalu berkembang menjadi bagian dari kebiasaan tulis-menulis dan merekam (tanpa mempedulikan lagi bentuk atau karakter mediumnya), sampai akhirnya menjadi simbol dari pengetahuan yang bernilai tinggi. Sewaktu konsep pustaka yang heuristik ini diadopsi oleh komunitas di Indonesia, ia bahkan menjadi lebih dari sekadar simbol melainkan juga sekaligus instrumen dan tata-cara berpengetahuan, sekaligus menjadi ajang kontestansi kebenaran yang tentunya dimulai dengan otoritas elit (khususnya ketika raja dan kerajaan muncul sebagai bentuk otoritas tersebut). Perkembangan penggunaan dan pemaknaan kata pustaka sebagaimana saya uraikan di atas memperlihatkan pula perkembangan epistemologi sosial di Indonesia; perkembangan tentang bagaimana masyarakat dan bangsa Indonesia berpengetahuan, baik tentang dirinya maupun tentang dunia sekitarnya.

Konsep pustaka juga dapat kita anggap cocok untuk memahami apa yang dikembangkan Steve Fuller sebagai kajian tentang hakikat kolektif dari pengetahuan. Fuller mengembangkan sebuah proyek penelitian filsafat yang dilengkapi sebuah jurnal di tahun 1987, *Social Epistemology*¹⁷ Fuller menggambarkan programnya sebagai sebuah gerakan intelektual yang melibatkan berbagai pihak secara lintas disiplin, untuk berupaya merekonstruksi masalah epistemologi ketika pengetahuan sudah diakui sebagai secara intrinsiknya bersifat sosial. Salah satu pertanyaan pokok proyek ini adalah: Bagaimana selama ini sebuah masyarakat mengelola upaya mencari pengetahuan, mengingat pengetahuan ini dikejar oleh banyak orang dan setiap orangnya bekerja berdasarkan sebuah pengetahuan yang sudah relatif pasti; masing-masing orang tersebut memiliki kapasitas kognitif yang tidak sempurna selain juga memiliki berbagai bentuk hubungan satu sama lainnya.

Konsep pustaka juga dapat membantu kita mengalihkan persoalan epistemik manusia dari orientasi ke bagaimana seseorang berpengetahuan secara individual ke bagaimana pengetahuan individual itu sesungguhnya dibentuk oleh hubungan sosial dan institusi sosial. Hasil-hasil kajian-kajian epistemologi sosial tentang dampak sistem dan interaksi sosial dapat dijadikan landasan teoritis untuk mengkaji bagaimana pustaka secara historis-kontekstual memengaruhi pengetahuan dan pandangan individual maupun masyarakat secara kolektif. Perpustakaan di bidang pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, misalnya, dapat dilihat sebagai bagian dari budaya-epistemik maupun sebagai ajang epistemologi sosial, asalkan kita bersedia mengkajinya sebagai pustaka, bukan sebagai kegiatan teknis perpustakaan.

Dari tinjauan historis sepintas di atas kita juga telah dapat melihat pustaka dalam konteks kebangsaan dan dengan demikian juga dalam konteks ketatanegaraan. Pustaka pada masa kolonialisme berperan secara tidak langsung dalam penyebaran pendapat tentang bentuk penyelenggaraan kehidupan bersama, termasuk bentuk yang lebih formal seperti politik dan pemerintahan. Dilihat dari kacamata masa kini, pustaka sebenarnya dapat kita kaitkan dengan apa yang kini dalam teori-teori politik disebut “pendekatan epistemik terhadap demokrasi”¹⁸. Perpustakaan umum di Indonesia, misalnya, seharusnya tidak dilihat hanya sebagai instrumen administrasi pemerintahan, melainkan sebagai sarana epistemologis masyarakat umum untuk memahami diri mereka sendiri, dan kemudian mengatur kehidupan mereka berdasarkan pemahaman itu. Sekali lagi, tentu saja pendekatan kajian seperti ini hanya dapat dilakukan jika kita berhenti berorientasi pada kegiatan teknis mengelola perpustakaan.

¹⁷ Lihat <https://social-epistemology.com/> dan <https://warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/sfuller>

¹⁸ Lihat <https://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social/#DemSocEpi>

Pustaka dan Informasi

Adopsi epistemologi sosial untuk memperjelas aspek ontologis IP&I bukanlah tanpa kritik. Dalam hal ini Luciano Floridi adalah salah satu kritikusny, dan kritiknya sangat baik untuk kita jadikan titik-tolak tentang aspek ontologis dari “informasi” di dalam IP&I. Ketika diundang untuk membahas IP&I di jurnal *Social Epistemology* Floridi menyatakan bahwa baik epistemologi sosial maupun IP&I memang sama-sama tertarik pada dinamika sosial dari pengetahuan, namun epistemologi sosial tak dapat menjadi pondasi IP&I (2002, hlm. 38). Salah satu alasan utama Floridi menyimpulkan demikian adalah karena epistemologi sosial sesungguhnya terdiri atas dua bidang riset utama, yaitu (1) sosiologi pengetahuan (*sociology of knowledge*) sebagai sebuah disiplin yang empirik dan deskriptif, dan (2) epistemologi tentang pengetahuan sosial (*epistemology of social knowledge*) yang merupakan kajian kritis dan konseptual tentang dimensi sosial dari setiap pengetahuan. Menurut pandangan Floridi, IP&I adalah ilmu yang memiliki posisi normatif (*normative stance*) sebab tradisi dan praktik di bidang perpustakaan “*far from being neutral, evaluation-free activities*” (2002, hlm. 39). Dengan karakter seperti ini, menurut Floridi, IP&I cenderung lebih menyerupai epistemologi tentang pengetahuan sosial.

Floridi kemudian menyatakan bahwa IP&I adalah lebih tepat jika mendasarkan dirinya ke apa yang ia sebut Filsafat Informasi (*Philosophy of Information*, biasa disingkat PI). Di kesempatan lain (2009), ketika membahas persoalan filsafati dari perkembangan masyarakat informasi Floridi menyatakan bahwa PI merupakan bidang filsafat yang berurusan dengan: (a) kajian secara kritis tentang hakikat konseptual dan prinsip-prinsip dasar informasi, termasuk dinamikanya, penggunaannya, dan ilmu-ilmunya, (b) pengembangan dan penerapan teori informasi dan metodologi komputasi untuk menjawab masalah-masalah filosofis. Secara mendasar, PI melakukan interpretasi yang eksplisit, jernih, dan persis terhadap pertanyaan ala Socrates yang klasik, “*ti esti. . . ?*” (“apa yang dimaksud dengan. . . ?”), yaitu “apa yang dimaksud dengan informasi?”

PI melakukan kajian kritis yang tidak sama dengan teori matematik tentang komunikasi data (dikenal sebagai *information theory*), melainkan secara menyeluruh mengembangkan dan mengintegrasikan sekumpulan teori untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menjelaskan berbagai prinsip dan konsep tentang informasi; memberi perhatian khusus kepada isu-isu sistemik yang muncul dari berbagai konteks aplikasi dan interkoneksi dengan konsep-konsep dasar filsafat tentang pengetahuan, kebenaran, makna, realita, dan nilai-nilai etika. Secara spesifik, Floridi juga mengungkapkan bahwa “dinamika informasi” seharusnya diartikan sebagai:

1. Pembentukan dan pemodelan lingkungan informasi yang bersifat sistemik, termasuk perangkat, format interaksi, pertumbuhan internal, aplikasi, dan sebagainya.
2. Daur hidup informasi, serangkaian jenjang bentuk dan aktivitas fungsional lewat mana informasi disampaikan, mulai dari kemunculan awalnya, sampai ke pemanfaatan akhirnya, dan sampai ke kemungkinan kepunahannya.
3. Komputasi, baik dalam pengertian proses olah algoritme maupun dalam pengertian yang lebih luas sebagai pengolahan informasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian itu, Floridi menawarkan PI sebagai basis dari IP&I dan bahkan sebagai *applied philosophy of information* yang ia definisikan seperti ini:

... sebuah disiplin yang berurusan dengan dokumen dan daur hidupnya, termasuk prosedur, teknik, dan perangkat yang mengimplementasikan, mengelola, dan mengaturnya... IP&I menerapkan prinsip-prinsip dasar dan teknik filsafat informasi dalam mengatasi masalah

konseptual maupun praktis... IP&I melaksanakan riset empirik untuk tujuan-tujuan praktis yang berorientasi jasa. (hlm. 46).

Pernyataan Floridi ini dapat kita jadikan acuan untuk membicarakan pustaka dan informasi dalam konteks Indonesia. Sebagaimana halnya kata pustaka, kata informasi memiliki makna yang spesifik sesuai penggunaan dan perkembangan teknologi di sebuah masyarakat, termasuk di Indonesia. Penggunaan frasa “perpustakaan dan informasi” yang menyandingkan dua kata itu sebenarnya hanya dilakukan di kalangan universitas yang menyelenggarakan pendidikan IP&I. Di luar universitas, informasi dimaknai secara berbeda. Persoalannya adalah: apa yang sebenarnya kita maksud dengan informasi, dan apakah kata ini merujuk ke hal yang sama dengan hal yang dirujuk Floridi atau yang dirujuk oleh bahasa-bahasa Inggris di negara lain.

Kamus bukanlah tempat yang memadai untuk mencari makna sebuah kata, dan penggunaan kata “informasi” sebaiknya kita lacak secara historis-kontekstual sebagaimana telah kita lakukan dengan kata pustaka di atas. Salah satu tonggak dalam sejarah penggunaan kata informasi di Indonesia yang perlu kita cermati adalah sejarah Departemen Penerangan yang dibentuk lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dan dibubarkan limapuluh empat tahun kemudian di masa Pemerintahan Abdulrahman Wahid (Gus Dur) di tahun 1999. Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan merupakan instrumen negara yang amat kuat dan menguasai serta mengatur nyaris segala bentuk komunikasi di masyarakat, khususnya yang menggunakan media massa. Secara sistematis dan spesifik, Departemen ini membuat regulasi dan mengawasi berlangsungnya komunikasi melalui media cetak (pers), televisi, film, radio, grafika, percetakan dan apa yang mereka sebut “penerangan umum”.

Ketika Gus Dur menjadi Presiden RI yang ke-4, Departemen dibubarkan dan sebagai penggantinya sementara dibentuklah Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) melalui Keppres 153 tahun 1999. Perhatikanlah bahwa kata “penerangan” yang sudah melekat dalam sejarah negara dan pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan diganti menjadi “informasi dan komunikasi”. Terlebih lagi, pada masa Pemerintahan Megawati, dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, menambah kesan kuat bahwa kata “penerangan” memang serupa dengan “informasi dan komunikasi”. Perubahan dan pemaknaan kata yang dilakukan oleh institusi-institusi puncak di sebuah negara tentu tidak boleh diabaikan jika kita hendak memahami secara menyeluruh, apa yang dimaksud dengan sebuah kata.

Dari segi ini, jelaslah bahwa di Indonesia makna “penerangan” dikaitkan dengan elan politik Orde Lama dan Orde Baru, serta khususnya dengan otoritarianisme di bidang komunikasi yang diterapkan Presiden Soeharto bersama jajarannya. Lalu kata “informasi” jelas diadopsi sebagai bagian dari upaya reformasi yang antara lain ingin membebaskan masyarakat Indonesia dari belenggu komunikasi rezim otoriter Orde Baru. Selain diperlukan kajian lebih seksama dan mendalam tentang hal ini, kita juga sebaiknya memahami perubahan makna berikutnya, yaitu ketika pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono institusinya berubah nama lagi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Akhiran “-tika” merujuk ke aspek teknologis dari sarana komunikasi dan informasi yang memang mengalami perubahan dan perkembangan pesat sejak meluasnya penggunaan teknologi komputer di Indonesia. Keputusan pemerintah untuk mengganti “informasi” menjadi “informatika” memperlihatkan perubahan orientasi dan persepsi tentang apa yang dapat diatur (diregulasi) oleh Negara dan apa yang tidak. Jelaslah bahwa negara bermaksud mengatur penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, sembari setidaknya menimbulkan kesan bahwa mereka tidak mengatur kegiatan masyarakat dalam berkomunikasi agar tidak terkesan otoriter.

Apakah adopsi kata “informasi” dan “informatika” ini akhirnya menghasilkan Pemerintahan dan Negara yang tidak otoriter bukanlah bagian dari makalah ini. Namun adopsi ini amat relevan dalam pembicaraan ontologi IP&I, khususnya karena di kalangan akademik adopsi kata informasi ini terjadi sebelum secara politik Pemerintah mengadopsinya. Adopsi juga sudah dilakukan sebelumnya oleh institusi puncak ilmu pengetahuan di negeri ini, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tahun 1987 mengadopsi kata “informasi” dalam Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII)¹⁹. Selain itu, adopsi juga sudah dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi teknologi informasi, termasuk yang terlibat dalam pemerintahan. Misalnya, di Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 sudah disebut perlunya sistem informasi dalam pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain, walaupun negara masih menggunakan istilah “penerangan”, praktik-praktik pemerintahan sudah memakai istilah “informasi” secara lebih spesifik.

Adopsi kata informasi di dalam IP&I di Indonesia juga memang berorientasi ke aspek penerapan teknologi komputer di kegiatan-kegiatan perpustakaan, amat berbeda dari adopsi kata pustaka yang dilakukan sejak bangsa ini meletakkan pondasi-pondasi negara Indonesia. Penambahan kata “dan informasi” juga dianggap tepat ketika universitas-universitas di Indonesia menyelenggarakan pendidikan profesional untuk pustakawan dan mengenali pentingnya pengetahuan dan keterampilan teknologi diajarkan kepada calon-calon pustakawan. Namun secara ontologis, penambahan kata informasi di dalam IP&I tidak dapat dikatakan mengubah apalagi menggantikan kata pustaka, khususnya sebagai bagian dari epistemologi sosial masyarakat Indonesia. Lebih tepat kiranya dikatakan bahwa penambahan itu merupakan pengkhususan dari pustaka ketika teknologi komputer mengubah total karakter sarana komunikasi dan interaksi sosial di masyarakat.

Dengan premis di atas, kita dapat pula mengajukan tanggapan kepada usul Floridi tentang landasan IP&I di atas sebagai sesuatu yang terlalu teknis dan spesifik. Pustaka dan informasi yang kita maksud di Indonesia bukanlah sekadar “.. dokumen dan daur hidupnya, termasuk prosedur, teknik, dan perangkat...”. Pustaka (dan kemudian informasi) secara historis-kontekstual adalah bagian dari epistemologi sosial masyarakat Indonesia, dan itulah yang patut dikaji dalam pengembangan IP&I di Indonesia. Mempertahankan makna pustaka dan informasi sebagai sesuatu yang “non teknis” juga membantu kita mengembangkan IP&I di masyarakat yang bhineka seperti Indonesia. Kita dapat mengikuti anjuran Hongladarom (2002) dengan pandangannya tentang aspek lintas budaya (*cross-cultural*) sebagai bagian tak terpisahkan dari epistemologi sosial, dan Trosow (2002) yang menolak IP&I dijadikan bagian dari upaya mencari kebenaran tunggal yang bebas nilai, melainkan sebaliknya adalah mengikuti atau membela sisi pandang tertentu (*standpoint epistemology*).

Bayangkan jika kita mengikuti dan menerapkan saran Hongladarom agar semua pihak yang terlibat dalam epistemologi sosial menyadari bahwa setiap budaya punya serangkaian nilai epistemik berbeda. Dalam konteks Indonesia, kajian-kajian IP&I tentang pustaka dan informasi di berbagai daerah dapat menuntun praktik-praktik pustakawan dan profesi informasi pada pengakuan bahwa praktik epistemik seseorang hanyalah salah satu dari praktik orang lain yang berbeda, dan bahwa kebhinekaan akhirnya merupakan keniscayaan. Pengakuan ini tidak sama dengan relativisme epistemik atau relativisme budaya; melainkan pengakuan terhadap praktik epistemik seseorang selalu merupakan sebuah keadaan yang berlanjut (*ongoing affair*) dan perlu disesuaikan dan disesuaikan-

¹⁹ LIPI dalam konteks ini merupakan salah satu institusi yang memaknai “informasi” dan “dokumentasi” secara lebih spesifik. Dimulai dengan terbentuknya Bagian Dokumentasi sebagai unit dari Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1956, kemudian menjadi Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Research Nasional Nomor : 107/M/ Kpts/Str/65. Pembicaraan terpisah tentang “dokumen” perlu dilakukan secara terpisah.

kembali sesuai dengan perubahan situasi. Dan tujuan dari penyesuaian-penyesuaian ini harus dikaitkan dengan apa yang paling dihargai oleh sebuah budaya.

Argumentasi Trosow pun amat relevan di Indonesia jika kita bersedia melihat pustaka dan informasi sebagai upaya menawarkan perspektif non-positivistik yang selama ini mendominasi IP&I. Trosow merujuk ke epistemologi-epistemologi '*standpoint*' atau '*borderlands*'. Ia menganggap bahwa pertimbangan-pertimbangan epistemologi sebaiknya didasarkan pada posisi sosio-kultural atau hirarkis seseorang. Misalnya, menjadi seorang perempuan memungkinkan seseorang memiliki pendirian tertentu, yang tidak dapat dimiliki oleh seorang pria. Hal sama berlaku untuk anggota-anggota kelompok minoritas dan yang secara sosiologis dirugikan atau terpinggirkan oleh pandangan-pandangan dominan. Konsep *standpoint epistemologies* dan praktik epistemik *cross-cultural* dapat membantu pengembangan IP&I di Indonesia untuk memahami bagaimana anggota masyarakat tertentu berada di posisi inferior (setidaknya secara ekonomi dan kekuasaan) ketika berhadapan dengan anggota masyarakat lainnya. Ini dapat membantu pustakawan dan profesi informasi lainnya di Indonesia mengembangkan etika profesi yang lebih "membumi" ke Indonesia.

Jika kita menerima usulan *cross-cultural epistemic practices* dan *standpoint epistemology* di atas, maka IP&I di Indonesia dapat menandingi (dan mengimbangi) pandangan-pandangan material-teknologis dari Floridi. Selain itu, pandangan budaya yang kritis ini akan bermuara pada kesadaran tentang keragaman budaya Indonesia, termasuk dalam praktik-praktik kepustakawanan. Profesi-profesi di bidang ini dengan demikian bisa berada di posisi yang lebih baik untuk melayani klien dan komunitas, dengan menyadari bahwa ada budaya-budaya lain yang praktik epistemiknya dapat jauh berbeda dari yang ia selama ini ketahui. Dari segi ini maka epistemologi sosial Shera sekaligus merupakan sebuah pertimbangan empirik yang menjabarkan bagaimana pengetahuan disebarkan dan dikelola di masyarakat, dan pertimbangan normatif yang berupaya mencapai kondisi optimal di mana pengetahuan seharusnya disebarkan dan diorganisasikan dengan memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya.

Konsep pustaka dan informasi di Indonesia, setelah mengalami tinjauan historis-kontekstual, kiranya amat cocok untuk menjadi landasan IP&I khususnya di negara ini, dan mungkin juga di negara-negara lain dengan sejarah perkembangan yang serupa.

Penutup

Saya berharap keseluruhan pembahasan yang dimulai dari pengakuan dan pembahasan tentang keberadaan dimensi sosial dalam ilmu pengetahuan ini dapat menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya tentang bagaimana kita mengembangkan IP&I di Indonesia, alih-alih mencoba mencari alasan untuk menghentikan atau mereduksinya menjadi semata-mata panduan teknis. Secara amat sementara ulasan saya bermaksud meyakinkan bahwa objek kajian IP&I adalah pustaka dan informasi, dan kita masih harus terus mendalami aspek ontologisnya sebagai bagian dari upaya kita untuk terus memperjelas IP&I.

Belum ada alasan yang cukup jelas dan logis tentang ketidakilmiahan IP&I, walau jelas bahwa orientasi penelitian, pengajaran, dan kebijakan tentang perpustakaan dan informasi di Indonesia terlalu ke masalah-masalah teknis dan prosedural. Orientasi inilah yang menyebabkan kekaburan tentang ontologi dan epistemologi IP&I di kalangan ilmuwannya sendiri, yang tentu saja berimbas ke ketidakpahaman pihak lain dan masyarakat luas yang selama ini berharap bahwa IP&I memberi sumbangan yang bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bertanahair.

Saya berharap makalah ini dapat dijadikan awal upaya yang lebih sistematis, menyeluruh, dan konsisten untuk terus menggali makna pustaka dan informasi di negeri ini, dan kemudian menjabarkan hasil penggalan itu menjadi praktik-praktik epistemologi sosial yang mendukung perkembangan bangsa ini.

Daftar Pustaka

- Åström, F. (2008), "Formalizing a discipline : the institutionalization of library and information science research in the Nordic countries" dalam *Journal of Documentation* Vol. 64 No. 5, hal. 721-737.
- Ben-David, J. dan Sullivan, T.A. (1975). Sociology of science. *Annual Review of Sociology*, Vol. 1, hal. 203-222.
- Desai, R. (2008), "Conclusion: from developmental to cultural nationalisms" dalam *Third World Quarterly*, 29 (3), hal. 647-670.
- Dick, A. L. (1999), "Epistemological positions and library and information sciences" dalam *Library Quarterly* vol. 69 no. 3, h. 305-323.
- Farid, H. (2016), Kolonialisme dan Budaya : Balai Poestaka di Hindia Belanda [tulisan blog] Diunduh dari <http://hilmarfarid.com/wp/tes-tes-3/>
- Fitzpatrick, E.B. (2008), "The Public library as instrument of colonialism: the case of the Netherlands East Indies", *Libraries & the Cultural Record*, 43 (3), hal. 270 – 285.
- Floridi, L. 2002. On defining library and information science as applied philosophy of information. *Social Epistemology*, 16: 37-49.
- Floridi, L. 2009. The Information Society and its philosophy: introduction to the special issue on the philosophy of information, its nature, and future developments. *The Information Society*, 25: 153– 158, online DOI: 10.1080/01972240902848583
- Foulcher, K. (1995). "In Search of the postcolonial in Indonesian literature", dalam *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 10 (2) hal. 147-171. URL: <http://www.jstor.org/stable/41056910>. Diakses : 05-06-2016.
- Hongladarom, S. 2002. Cross-cultural epistemic practices, *Social Epistemology*, 16 (1): 83–92.
- Jedamski, D. (1992). "Balai Pustaka : A Colonial wolf in sheep's clothing" dalam *Archipel*, 44, hal. 23-46; doi : 10.3406/arch.1992.2848, diunduh 17/03/2016 dari http://www.persee.fr/doc/arch_0044-8613_1992_num_44_1_2848
- Knorr-Cetina, K. (1999) *Epistemic Cultures : How the sciences make knowledge*, Cambridge, Mass : Harvard University Press.
- Kozok, U. (2000), "On writing the not-to-be-read: literature and literacy in a pre-colonial 'tribal' society", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 156/1, hal. 33-55.
- Laufer, S.B (1919). "INO-IRANICA: Chinese Contributions to the History of Civilization in Ancient Iran" dalam Publications of the Field Museum of Natural History. Anthropological Series Vol. 15,

No. 3, hal. 599-630 Published by: Field Museum of Natural History Stable URL:
<http://www.jstor.org/stable/29782155>.

- Mahayana, M. (1994), "Politik Kolonial Belanda di Balik Pendirian Balai Pustaka, Laporan Penelitian OPF 1994/1995 - Fakultas Sastra Universitas Indonesia (tidak diterbitkan).
- Merton, R.K. (1973). *The Sociology of Science: Theoretical and empirical investigations*, Chicago, ILL : University of Chicago Press
- Pendit, P.L (2011a), *Meneliti Bidang Perpustakaan dan Informasi di Indonesia : Apa dan Bagaimana?* Makalah untuk Workshop Pustakawan, "Sukses Melakukan Pengkajian Informasi dan Perpustakaan", Perpustakaan UGM, Yogyakarta, 11 Februari 2011
- Pendit, P.L. (1992a), "Ilmu perpustakaan dan kepastakawanan Indonesia". Makalah untuk diskusi panel Perpenduan Teoritis, Praktisi dan Organisasi Pustakawan dalam Era Globalisasi Informasi diselenggarakan Komisi Profesi dan Komisi Usaha Pengurus Besar Ikatan Pustakawan di Perpustakaan Nasional Jakarta, 21 Maret 1992.
- Pendit, P.L. (1992b), "Model untuk kepastakawanan Indonesia : sebuah usul pendahuluan" makalah pendukung untuk Kongres VI dan Seminar Perpustakaan Ikatan Pustakawan Indonesia, Padang 18 - 20 November 1992.
- Pendit, P.L. (1993), *Perpustakaan Umum, Golongan Menengah, dan Demokratisasi : sebuah tinjauan awal tentang sejarah peran perpustakaan umum dalam masyarakat Indonesia*. Laporan Penelitian OPF Fakultas Sastra Universitas Indonesia 1993-1994.
- Pendit, P.L. (2008), "Perpustakaan digital dan kepastakawanan: dari mana, hendak ke mana?" makalah Seminar Sehari Emerging Technology for Libraries, di UK Petra Surabaya, 29 Januari 2008.
- Pendit, P.L. (2009a), "Red-plate professionalism : Critical analysis on the relationships between Indonesian Library Association and the National Library of Indonesia" makalah untuk CONSAL- Congres of South East Asia Libraries , Hanoi, Viet Nam, 21 April 2009.
- Pendit, P.L. (2009b) "Dari cicak vs buaya sampai pencitraan hari kiamat : tantangan kepastakawanan Indonesia" makalah untuk Seminar Sehari Freedom of Information, diselenggarakan oleh Goethe Institute dan PETRA Universitas Kristen, Surabaya, 8 Desember 2009.
- Pendit, P.L. (2011b), persoalan epistemologi dalam ilmu perpustakaan dan Informasi dalam Prosiding Seminar Ilmiah dan Lokakarya Nasional Information for Society: Scientific Point of View, PDII-LIPI, Jakarta 20 - 21 Juli 2011, hal. 263-271.
- Powell, R. (2006), "Evaluation research: an overview" dalam *Library Trends*, Vol. 55, No. 1, hal. 102–120.
- Setiadi, H. F. (1991), "Kolonialisme dan budaya : Balai Pustaka di Hindia Belanda" dalam *Prisma*, no. 10 tahun XX, hal. 23 – 46.
- Sulistyo-Basuki (1994), *Periodisasi Perpustakaan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sulistyo-Basuki (2008), *Sejarah Perpustakaan Nasional RI : Sebuah Kajian*, bagian dari kegiatan Pengembangan Situs Web Resmi Perpustakaan Nasional RI tahun 2008 - http://kelembagaan.perpusnas.go.id/Digital_Docs/pdf/about_us/histories/normal/HASIL_KAJIAN_SEJARAH_PERPUSNAS_RI.PDF , diakses 17 Juni 2016.

- Taher, M. (1994). *Librarianship and Library Science in India: An Outline of Historical Perspectives*, Calcuta : Concept Publishing Company.
- Taufik, I. (1977). *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, Jakarta : Triyinc.
- Teeuw, A. (1972), "The impact of Balai Pustaka on modern Indonesian literature", *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 35/1, hal. 111-127.
- Teygeler, R. (1993), "Pustaka: a study into the production process of the Batak book", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 149/3, hal. 593-611.
- Trosow, S. E. 2002. Standpoint epistemology as an alternative methodology for Library and Information Science. *The Library Quarterly*, 71: 360-382.
- Wilken, G.A. (1887). "Het Shamanisme Bij De Volken Van Den Indischen Archipel" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië*, 36 (3), hal. 427-497
- Wyatt, D.K. (1982), "The Surakarta Manuscript Project" dalam *Indonesia*, 34, hal. 75-88 – permanent link <http://cip.cornell.edu/seap.indo/1107017331>